

ABSTRAK

Anna Tasya Alfitri, 1208010028, 2024, *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Pengangguran di Kota Cimahi

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Masalah pengangguran yang serius ini telah mendorong setiap pemerintah di berbagai kota untuk mengambil langkah-langkah yang proaktif dan sistematis dalam menanggulangi dampaknya yang luas terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi tidak terkecuali dalam hal ini, di mana sebagai respon untuk permasalahan pengangguran, pemerintah Kota Cimahi melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti LPK, BKK, hingga industri.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai *starting condition, institutional design, facilitative leadership* dan *collaborative process* dari kebijakan penanggulangan pengangguran di Kota Cimahi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *collaborative governance* Ansell & Gash yang terdiri dari empat dimensi meliputi kondisi awal kolaborasi, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas data yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *collaborative governance* dalam penanggulangan pengangguran di Kota Cimahi belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut karena ditemukan beberapa permasalahan dalam proses kolaborasi, yang meliputi 1) Dimensi kondisi awal yang belum optimal dilihat dari kurangnya pemahaman *stakeholder* akan peran masing-masing; 2) Dimensi desain kelembagaan yang belum terlaksana dengan baik karena lemahnya partisipasi forum dan sanksi dari aturan yang melandasi; 3) Dimensi kepemimpinan fasilitatif belum terlaksana dengan baik dilihat dari rendahnya keberanian *stakeholder* untuk menyuarakan pendapat mereka; serta 4) Dimensi proses kolaborasi belum terlaksana dengan baik dilihat dari rendahnya komitmen industri terhadap proses kolaborasi, *stakeholder* yang masih mendahulukan kepentingan masing-masing, serta belum signifikannya pengurangan jumlah pengangguran.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penanggulangan Pengangguran, Kota Cimahi